

BAB IV

IDENTITAS NEO-OTTOMANISME DAN KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY

Pada bab ini akan memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan mengenai mengapa Rezim Erdogan mengambil kebijakan *open door policy* terhadap pengungsi Suriah di Turki. Kemudian pada sub bab pertama akan menjelaskan tentang pergeseran identitas Turki menjadi Neo-Ottomanisme. Selanjutnya pada sub bab kedua akan menjelaskan bagaimana identitas Neo-Ottomanisme mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki terhadap pengungsi Suriah.

A. Pergeseran Identitas Turki (Neo-Ottomanisme)

Turki merupakan bagian terpenting dari sejarah peradaban Islam dunia. Dahulu, Turki menjadi salah satu peradaban yang paling berpengaruh dibandingkan dengan peradaban-peradaban lainnya pada abad pertengahan yakni dengan adanya kerajaan Turki Usmani. Turki Usmani berkembang menjadi sebuah kerajaan besar yang dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama.

Wilayah kekuasaan Turki Usmani mencakup Bizantium, negara-negara di Semenanjung Balkan, pulau-pulau di Mediterania Timur, Hungaria, Rusia, Irak, Suriah, Kaukasus, Palestina, Mesir, beberapa negara Arab, dan Afrika Utara (Ergec, 2014, hal. 141). Lebih jauh, Turki Usmani juga berhasil menorehkan berbagai pencapaian yang gemilang dalam berbagai aspek kehidupan.

Pencapaian gemilang Turki Usmani tersebut tidak terlepas dari identitas Turki Usmani yang digunakan oleh para pemimpin kerajaan. Identitas tersebut lekat dengan nilai-nilai Islam sufisme. Konsep sufisme telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kerajaan Turki Usmani seperti dalam bidang politik, spiritual, militer, bahkan intelektual sejak berabad-abad lamanya.

Pada dasarnya sufisme merupakan salah satu jalan yang digunakan manusia untuk mendekati diri kepada Tuhan. Secara terminologis, sufisme merupakan sebuah jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk menjadi manusia yang sempurna lagi suci, atau dalam hal lain adalah penyatuan diri dengan Tuhan (Gamm, 2011).

Adapun prinsip sufisme yakni mengedepankan perdamaian dan menjunjung tinggi toleransi terhadap keberagaman. Hal tersebut tercermin dalam kerajaan Turki Usmani yang hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain secara tenteram, damai, dan stabil. Seperti halnya ketika Turki Usmani hidup berdampingan dengan orang-orang Kristen Bizantium, bangsa Arab, dan Afrika.

Dengan adanya prinsip sufisme tersebut, ditambah dengan posisi strategis Turki Usmani sebagai kerajaan besar, membuat Turki Usmani berkepentingan untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara luas. Sehingga hal tersebut mengantarkan Turki Usmani berkepentingan untuk memimpin dan melindungi dunia Islam. Sebagai misal adalah kepentingan Turki Usmani dalam melindungi kerajaan Aceh dari jajahan Portugis pada masa lampau. Para pemimpin Turki Usmani kala itu membuat kebijakan dengan mengirimkan bala pasukan dari tentara kerajaan yang biasa disebut Jenissari.

Selain itu, Turki Usmani juga berperan aktif dalam melindungi Palestina dari bangsa Yahudi. Wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Turki Usmani pada 1867-1909, dimana saat itu kepemimpinan sedang dipegang oleh Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1882, terjadi gelombang migrasi bangsa Yahudi secara besar-besaran ke Palestina. Ketika itu rombongan Yahudi berjumlah sekitar 25.000 orang dan disebut sebagai leluhur pertama bangsa Yahudi di Palestina (Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, 2015).

Seiring dengan berjalannya waktu, bangsa Yahudi melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan tanah Palestina, seperti halnya mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid. Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Sultan. Selanjutnya, pada tahun 1902 bangsa Yahudi menyogok Sultan Abdul Hamid II dengan sejumlah

tawaran seperti memberi uang sebesar 150 juta pounsterling untuk Sultan, melunasi hutang Turki Usmani yang pada saat itu mencapai 33 juta poundsterling, membuat kapal induk guna memperkuat pertahanan Turki Usmani, memberi piutang kepada Turki Usmani sebesar 35 juta poundsterling tanpa bunga, dan selanjutnya tawaran terakhir adalah Yahudi akan mendirikan sebuah perguruan tinggi atas nama Turki Usmani di Palestina (El-Fikri, 2017). Kelima tawaran tersebut tidak membuat keputusan Sultan Abdul Hamid II bergeming dan tetap menolak tawaran-tawaran tersebut.

Setelah bertahan selama lebih dari tujuh abad, Turki Usmani hancur secara perlahan akibat maraknya gerakan-gerakan perlawanan dari kalangan pemuda, hingga menyusupnya ide-ide Barat ke dalam masyarakat internal Turki Usmani. Saat itu, kalangan Turki Muda dengan cepat menggunakan kesempatan tersebut untuk mendirikan Republik Turki. Secara resmi, proklamasi kemerdekaan Republik Turki dinyatakan pada 29 Oktober 1923 dengan presiden sebagai kepala negara. Presiden pertama yang terpilih adalah Mustafa Kemal Pasha.

Mustafa Kemal menginginkan Turki bertransformasi menjadi negara modern dan maju sebagaimana negara-negara Eropa dengan melakukan beberapa langkah yang merujuk pada ideologinya yakni Kemalisme. Ideologi tersebut telah digunakan pula sebagai identitas Turki pada saat itu. Dari ideologi Kemalisme tersebut, Mustafa Kemal membuat dua pilar dalam membangun Republik Turki.

Pertama, revolusioner dan sekulerisme militan. Dalam mewujudkan mimpinya mendirikan negara sekuler, langkah awal yang dilakukan Mustafa Kemal adalah menghapus kerajaan Turki Usmani dan mengubah sistem kesultanan/kekhilafahan dalam tubuh Turki Usmani. Lebih jauh, Mustafa Kemal juga mengubah tulisan Arab menjadi tulisan latin, melarang pengumandangan adzan dengan bahasa Arab melainkan bahasa Turki, menghapus sistem pendidikan Islami, bahkan melarang penyebaran ajaran-ajaran sufisme yang selama ini dijadikan nilai yang dipegang erat para pemimpin Turki Usmani.

Selanjutnya pilar yang kedua adalah nasionalisme asimilasionis. Mustafa Kemal memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi terhadap negara yang telah ia bangun. Namun, kecintaan tersebut membuat Mustafa Kemal menolak konsep multikulturalisme yang selama ini juga melekat pada Turki Usmani. Republik Turki di bawah naungan Mustafa Kemal masih mengakui penduduk non-Muslim yang mendiami Turki pada saat itu. Akan tetapi secara de facto, rezim Mustafa Kemal melakukan diskriminasi terhadap bangsa Armenia, Yunani, dan Yahudi dengan melarang mereka memegang pekerjaan pada sektor pemerintahan (Taşpınar, 2008, hal. 5). Kebijakan inilah yang semakin menunjukkan bahwa nasionalisme Turki telah menggerus rasa toleransi dengan keberadaan bangsa lain di Turki.

Selama beberapa dekade, Republik Turki berada dalam kekeangan sistem sekulerisme ala Mustafa Kemal Atatürk dengan cita-citanya mendirikan negara maju dan modern layaknya negara-negara Barat. Setelah Mustafa Kemal wafat pada 1938, Turki secara perlahan memunculkan wajah Islam kembali, khususnya dalam perpolitikan Turki. Hal itu bermula ketika Adnan Menderes terpilih menjadi Perdana Menteri pada pemilihan multipartai pertama Turki pada 1950

Menderes menekankan pentingnya identitas Muslim bagi bangsa Turki yang selama ini tergerus sekulerisme dan juga memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan rezim sekuler dengan pemulihan hak-hak umat Islam. Menderes mulai menggeser orientasi kebijakan luar negeri Turki terhadap Timur Tengah yang selama ini diabaikan oleh rezim sekuler tersebut. Ia terpilih menjadi Perdana Menteri Turki sebanyak tiga kali. Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti tantangan memperbaiki sekulerisme berjalan dengan baik. Semenjak Mustafa Kemal memimpin Turki, militer Turki telah diposisikan sebagai pelindung sekulerisme. Sehingga pada tahun 1960-an, militer Turki melancarkan upaya kudeta militer dan Menderes dihukum mati karena dianggap antisekulerisme (Ergec, 2014, hal. 141).

Kemudian upaya memunculkan kembali identitas Islam (sufisme) Turki ditonjolkan kembali oleh mantan perdana menteri dan presiden Turki ke-delapan yakni Turgut Ozal. Berbeda dengan Menderes yang berupaya memulihkan hak-hak umat Islam dengan menghidupkan syariat Islam, Ozal berupaya menggali kembali nilai-nilai peninggalan Turki Usmani dalam masyarakat Turki. Ozal lebih menekankan rumusan kebijakan yang bersifat non-politis seperti dalam hal sosial dan budaya sebagaimana yang telah dilakukan Turki Usmani.

Misalnya, kebijakan luar negeri Turki era Ozal yang memperluas pengaruh sosial dan budaya dengan negara-negara Asia Tengah. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan berdirinya organisasi internasional berbasis sosial-budaya yang bernama *International Organization of Turkic Culture* (TURKSOY) yang terdiri dari Turki, negara-negara Asia Tengah dan Azerbaijan (Agnes Czajka, 2015).

Selanjutnya, perjuangan mengembalikan identitas Islam (sufisme) juga dilakukan dan dilanjutkan oleh Bapak Politik Islam Turki, Necmettin Erbakan. Selama beberapa dekade ia berusaha memunculkan wajah Islam kembali dalam perpolitikan Turki. Beberapa langkah yang telah ia lakukan adalah dengan mendirikan berbagai partai Islam, namun partai yang ia dirikan kerap kali dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan dapat mengganggu stabilitas Turki pada saat itu yang masih berada di bawah bayang-bayang sekulerisme Atatürk.

Pada 17 Januari 1970, Erbakan beserta 17 temannya mendirikan *National Order Party (Millî Nizam Partisi)*. Partai tersebut memiliki semboyan "*morality and spirituality first*" (Arslanbenzer, 2015). NOP adalah partai Islam pertama sepanjang sejarah berdirinya Turki Modern di bawah Mustafa Kemal. Akan tetapi partai tersebut berumur pendek, berselang satu tahun eksistensi NOP, terjadi kudeta militer tahun 1971 dan mengharuskan partai tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap antisekulerisme.

Pada Oktober 1972, Erbakan kembali mendirikan partai Islam bernama *National Salvation Party (Millî Selâmet*

Partisi) dan berhasil mendapat 48 kursi di parlemen dengan 12% suara. Bahkan Erbakan sempat menerima tawaran dari ketua Partai Republik yakni Bulent Ecevit untuk berkoalisi. Baik Erbakan maupun Ecevit, keduanya menggunakan kesempatan tersebut untuk mencapai kepentingan masing-masing partainya. Ketika terjadi Operasi Perdamaian Siprus yakni sebuah operasi untuk menyelamatkan orang-orang Siprus Turki dari ancaman organisasi teroris Yunani Siprus, keduanya menerima apresiasi dari para pendukungnya karena dianggap telah berhasil melakukan operasi tersebut dengan baik (Arslanbenzer, 2015).

Akan tetapi koalisi keduanya tidak bertahan lama, karena pada tahun 1981 Mahkamah Konstitusi kembali membubarkan partai besutan Erbakan tersebut. Erbakan dan anggota partainya ditangkap dan kembali dikenai tuduhan antisekulerisme. Akhirnya pada Juli 1981, Erbakan dan para anggota partainya resmi dibebaskan. Erbakan dan beberapa pemimpin partai di Turki seperti Bulent Ecevit dan lain sebagainya dilarang untuk kembali terjun ke perpolitikan Turki. Namun, larangan tersebut berhasil dicabut pada tahun yang sama melalui referendum.

Pada tahun 1983, Erbakan terpilih menjadi ketua partai *Welfare Party (Refah Partisi)* yang didirikan oleh para pengikutnya. Akan tetapi partai tersebut tidak berhasil menembus pemilihan umum tahun 1987 dan partai tersebut baru berhasil memasuki parlemen dalam pemilihan umum 1991. Tanggal 28 Februari 1997, Dewan Keamanan Nasional Turki memperketat larangan mengenai antisekulerisme dan berujung pada pembubaran kembali partai Erbakan satu tahun setelahnya.

Erbakan telah mengetahui bahwa *Welfare Party* akan segera dibubarkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi, maka dari itu Erbakan kembali berusaha mendirikan partai lain dengan misi yang kurang lebih sama seperti partai-partai yang ia dirikan sebelumnya yakni mengusung nilai-nilai Islam. Pada 17 Desember 1997, Erbakan mendirikan *Virtue Party (Fazilet Partisi)*, namun partai ini juga tidak berumur panjang hanya bertahan hingga 2001 saja. Kemudian pada 2008,

Erbakan dijatuhi hukuman tahanan rumah, namun kondisi kesehatannya yang semakin menurun membuat Erbakan mendapat pengampunan dari Presiden Abdullah Gul masa itu. Erbakan wafat pada 27 Februari 2011 di sebuah rumah sakit (Arslanbenzer, 2015).

Secara perlahan, pergerakan Erbakan selama ini dengan mendirikan berbagai partai politik berbasis Islam, mendapat tempat kembali di hati masyarakat Turki. Meski sebelumnya partai-partai yang diusungkan oleh Erbakan seringkali dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun kini partai Islam semakin ditunggu kehadirannya di tengah masyarakat Turki. Terlebih selepas kepergian Necmettin Erbakan pada 2011 silam.

Pada 14 Agustus 2001, muncul kembali partai berhaluan Islam dalam kancah perpolitikan Turki yakni Partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*). Pendiri Partai AKP adalah Abdullah Gul dan Recep Tayyip Erdogan. Meski tergolong masih baru dalam perpolitikan Turki pada saat itu, akan tetapi partai AKP memiliki anggota yang cukup banyak dan mayoritas berasal dari kalangan menengah.

Di bawah pemerintahan AKP, sejarah perpolitikan Turki meraih beberapa pencapaian yang mengagumkan yang mendorong kepuasan masyarakat terhadap partai tersebut. Sebagaimana pencapaian pada bidang ekonomi, dimana Turki berhasil menduduki posisi sebagai salah satu negara besar terkuat (G-20) dengan rata-rata peningkatan sebesar 10% pertahun. Selain ekonomi, pencapaian lainnya yang berhasil dilakukan adalah dengan memberi perlindungan terhadap hak-hak kebebasan individu seperti penggunaan kerudung bagi muslimah Turki dan lain sebagainya.

Dua contoh di atas merupakan sebagian kecil dari implementasi kepentingan Turki saat ini dengan merujuk identitas baru (Neo-Ottomanisme) yang menjadi acuan dalam bertindak. Pemerintah Turki di bawah Erdogan berusaha memunculkan kembali identitas Turki yang islami sebagaimana yang telah diupayakan oleh Adnan Menderes dan Necmettin Erbakan sebelumnya.

Berikut merupakan pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu pada saat mengikuti kegiatan partai di Kota Kizilcahamam yang menunjukkan bukti bahwa Turki saat ini memegang erat Neo-Ottomanisme, khususnya pada pengimplementasian kebijakan luar negeri Turki.

We have an Ottoman legacy. They call it as the New Ottoman. Yes, we are the New Ottoman. We have to care about the countries in our region. We are even expanding to North Africa... (Ergec, 2014, hal. 142)

Peristiwa serangan 9/11 di Amerika dan Arab Spring di beberapa negara Timur Tengah turut mempengaruhi orientasi kebijakan partai AKP dalam beberapa dekade terakhir. Partai AKP sebagai partai yang mendominasi perpolitikan Turki mencoba membangun kembali hubungan dengan Timur Tengah yang seolah telah diabaikan oleh rezim sekularis sebelumnya. Peristiwa tersebut juga telah mendorong rezim Turki di bawah Erdogan untuk berperan aktif sebagai mediator konflik Timur Tengah. Lebih jauh, kebijakan luar negeri Turki yang terkenal dengan *zero problem with neighbors* menunjukkan sikap Turki yang ingin menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga di institusi regional maupun khususnya Timur Tengah.

Neo-Ottomanisme telah membentuk kepentingan Turki sebagai negara yang aktif di kawasan maupun kancah global. Rezim Erdogan ingin memproyeksikan Turki sebagai pusat politik dunia dengan merangkul wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan Turki Usmani dahulu seperti negara-negara Balkan, Kaukasus, hingga Timur Tengah. Hal tersebut merujuk pada pernyataan Davutoglu yang berbunyi:

As in the sixteenth century, when the Ottoman Balkans were rising, we will once again make the Balkans, the Caucasus, and the Middle East, together with Turkey, the center of world politics in the future. That is the goal of Turkish foreign policy and we will achieve it. (Hillel Fradkin, 2013, hal. 44).

Adapun definisi mengenai Neo-Ottomanisme menurut Omer Taspinar dapat dipahami dengan beberapa indikator. Pertama, suatu upaya untuk menghadirkan kembali warisan keislaman Turki Usmani di dalam maupun luar negeri (Taspinar, 2008, hal. 14). Turki Usmani mewariskan wilayah-wilayah yang luas sebelum akhirnya satu-persatu wilayah kekuasaannya melepaskan diri. Wilayah Turki Usmani terbentang luas dari Timur Tengah hingga Asia dan Afrika. Ekspansi Turki Usmani berlanjut dari masa ke masa dengan keberhasilan pasukan Jenissari yang tangguh dalam menaklukkan setiap wilayah.

Kejayaan Turki Usmani bertahan sekitar tujuh abad lamanya. Namun kini, Neo-Ottomanisme tidak mewarisi sepenuhnya ekspansi wilayah sebagaimana era Turki Usmani dengan keberhasilannya menaklukkan berbagai wilayah. Akan tetapi, Neo-Ottomanisme lebih menunjukkan kepada perluasan pengaruh kepada negara-negara yang pernah menjadi bagian Turki Usmani maupun negara-negara lain dengan menggunakan cara yang lebih halus (*soft power*) dalam politik, ekonomi, diplomasi, dan budaya.

Selain mewariskan sejarah ekspansi imperialis, Turki Usmani juga memberikan sebuah pandangan dalam membuat kebijakan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaannya. Dalam artian, Turki Usmani menerima keberagaman etnis, agama, budaya pada setiap wilayah yang telah ditaklukkan dan hidup berdampingan dengan segala heterogenitas tersebut. Dengan demikian, Neo-Ottomanisme berusaha menjunjung kembali perdamaian dan toleransi sebagaimana warisan Turki Usmani dahulu.

Hal tersebut terbukti dengan kebijakan Turki yang memberikan hak kepada etnis Kurdi di Turki untuk tetap tinggal disana dan memberikan kebebasan berekspresi atas identitas mereka sebagai etnis Kurdi selama mereka patuh terhadap undang-undang Turki. Selain itu, penerimaan pengungsi Suriah juga menunjukkan rezim Erdogan terbuka dengan pengungsi Suriah yang berbeda secara rasial, bahasa, dan budaya. Namun, semenjak konflik Suriah meletus hingga 2018, Turki masih membuka perbatasan bagi pengungsi

Suriah yang terkena dampak negatif konflik tersebut dan menjadikan Turki sebagai negara penerima pengungsi Suriah terbanyak di dunia.

Kedua, indikator Neo-Ottomanisme adalah adanya rasa agung dan kepercayaan diri dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri. Neo-Ottomanisme melihat Turki sebagai negara superpower. Visi strategis dan budayanya tercermin dari ekspansi wilayah Turki Usmani dulu. Turki sebagai negara dengan sejarah peradaban besar harus berperan aktif dalam hal politik dan diplomasi, serta ekonomi dalam wilayah yang lebih luas dimana Turki akan menjadi pusatnya. Dari kepercayaan diri tersebut lahirlah sebuah ambisi untuk Turki berperan aktif menciptakan perdamaian dengan adanya keberagaman (Taşpınar, 2008, hal. 15).

Akan tetapi, penganut Kemalisme menganggap ambisi Neo-Ottomanisme membahayakan kepentingan nasional Turki, seperti halnya pemberian hak kepada Kurdi dan memberi kesempatan kepada Muslim untuk terjun ke ranah politik. Kebijakan luar negeri Turki pada era Mustafa Kemal memang berbanding terbalik dengan Turki Usmani dan Neo-Ottomanisme di Turki saat ini. Kemalis menolak untuk menjalin hubungan dengan negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah. Dengan kebijakan tersebut, Kemalis juga mempertahankan hubungannya yang menegangkan dengan etnis Kurdi yang ingin memisahkan diri karena dituntut untuk meleburkan diri dengan etnis Turki.

Ketiga, Neo-Ottomanisme ingin merangkul dunia Barat seperti Turki Usmani yang selama ini merangkul dunia Islam. Merujuk pada pendapat Omar Taşpınar, hubungan Turki dengan Barat dan Timur diibaratkan seperti kota Istanbul yang membelah Eropa dan Asia, serta diibaratkan juga seperti Dewa Janus dalam mitologi Romawi yang memiliki dua sisi wajah. Turki Usmani pernah mendapat julukan sebagai pesakit dari Eropa (*the sick man of Europe*).

Kawasan yang digunakan dalam julukan tersebut merujuk kepada benua Eropa bukan Asia maupun Arab. Hal ini seakan menunjukkan bahwa Turki memang memiliki warisan Eropa dan menjadi hal yang penting bagi Neo-

Ottomanis. Mereka terbuka dengan dunia Barat seperti halnya mereka terbuka dengan dunia Islam. Tindakan fleksibilitas yang ditunjukkan Neo-Ottomanis tersebut tidak terdapat dalam Kemalis, yang justru menganggap Islam dan multikulturalisme sebagai musuh potensial bagi revolusi Kemalis (Taşpinar, 2008, hal. 16).

Pada dasarnya Neo-Ottomanisme tidak memiliki definisi yang paten. Merujuk pada kebijakan luar negeri berdasarkan Neo-Ottomanis, terdapat banyak interpretasi yang berbeda mengenai konsep Neo-Ottomanisme itu sendiri, sehingga terkadang menimbulkan ambiguitas yang mengurangi nilai analitis dan eksplanasi dari konsep tersebut. Namun, terdapat tiga gambaran/citra yang berbeda mengenai Ottomanisme pada era Turki Usmani yang dapat mendukung analisa dan penjelasan berkenaan dengan kebijakan luar negeri Turki saat ini. Ketiga hal tersebut dapat dinamai sebagai tipologi dari Neo-Ottomanisme.

Pertama, citra Turki Usmani sebagai puncak peradaban yakni sebagai pewaris kerajaan yang memiliki warisan budaya yang luas, Turki merasa perlu untuk mengolah dan melestarikan kebudayaan tersebut terhadap masyarakat Turki pada khususnya maupun masyarakat internasional pada umumnya. Sebagaimana pernyataan Presiden Erdogan yakni sebagai berikut:

Selama ribuan tahun, kita telah membawa peradaban yang unik, dimana kita telah membangun peradaban tersebut dengan budaya yang beraneka ragam. Termasuk didalamnya adalah bahasa. Bahasa Turki bukan hanya bahasa komunikatif milik golongan tertentu saja, melainkan bahasa Turki juga merupakan bahasa pengetahuan dan sekaligus menjadi bahasa seni dan sastra... (Agnes Czajka, 2015, hal. 2).

Pernyataan yang serupa juga pernah dilontarkan oleh Ahmet Davutoglu. Ia menyatakan bahwa Turki akan mengencarkan promosi kebudayaan terhadap khalayak internasional, salah satunya dengan mendirikan *Yunus Emre*

Foundation, yakni sebuah yayasan yang khusus mempelajari kebudayaan Turki secara lebih mendalam. Yunus Emre Foundation tersebar di berbagai kawasan seperti Eropa, Timur Tengah, Asia, hingga ke Amerika Utara.

Hal ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi Neo-Ottomanisme. Berdasarkan pernyataan Davutoglu, yayasan tersebut mempunyai dua tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah mempertemukan budaya nasional Turki dengan budaya dari belahan negara lain. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan pengaruh kebudayaan nasional Turki dalam kancah internasional (Agnes Czajka, 2015, hal. 2).

Kedua, citra Turki Usmani sebagai kerajaan Islam. Dalam citra kedua ini terdapat dua pandangan berbeda dalam mengkaitkan Neo-Ottomanisme dengan Islamisme ala Turki Usmani dahulu yakni versi lemah (*weak version*) dan versi kuat (*strong version*). Versi lemah melihat bahwa Neo-Ottomanisme sebagai Islamisme adalah menjadi penangkal dari ideologi Kemalisme yang lekat dengan sekulerisme, nasionalisme, dan westernisasinya. Pada citra kedua ini, agenda politik luar negeri Turki bergeser kepada Timur Tengah dan Afrika Utara, dimana sebelumnya terlalu mengikatkan diri ke Barat. Namun pergeseran tersebut bukan berarti berpaling dari Barat, akan tetapi lebih kepada penyeimbangan kembali sebagai tanggung jawab historis dan menyesuaikan dengan kepentingan kawasan saat ini. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Erdogan sebagai berikut:

Turki saat ini menjalin hubungan dengan Dunia Barat, namun bukan berarti Turki berpaling dari Dunia Timur. Kita tidak dapat membeda-bedakan sikap kita kepada negara-negara yang selama ribuan tahun telah hidup berdampingan dengan Turki... (Agnes Czajka, 2015, hal. 3).

Kemudian dari versi pendapat yang lebih kuat melihat Neo-Ottomanisme saat ini bukan menyeimbangkan hubungan antara Timur dan Barat melainkan berpaling dan menjaga jarak dari Barat dan nilai-nilainya, dan menuju ke Timur

beserta nilai-nilainya. Menurut Soner Cagaptay, seorang ahli politik dari Turki, ia beranggapan bahwa Turki Usmani tidak begitu Islami, namun justru liberal. Sedangkan kebijakan luar negeri AKP saat ini lebih Islami.

Ketiga, citra Turki sebagai kerajaan yang liberal dan multikultural. Turki memanfaatkan dengan adanya citra tersebut untuk mempromosikan dan menunjukkan kepada dunia kebijakan politik domestik pada khususnya, sebagai contoh kebijakan politik terbuka terhadap etnis Kurdi dan Alawi.

B. Pengaruh Identitas Neo-Ottomanisme pada Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Pengungsi Suriah

Intepretasi identitas Neo-Ottomanisme dalam kebijakan luar negeri Turki akan sangat beragam. Hal itu dikarenakan fleksibilitas Neo-Ottomanisme dalam berbagai aspek dan memiliki korelasi dengan apa yang telah dilakukan Turki Usmani dahulu. Sehingga prioritas kebijakan luar negeri Turki dari era Adnan Menderes, Turgut Ozal, Erbakan, hingga Erdogan berbeda-beda.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Adnan Menderes. Ia berupaya menghidupkan syariat Islam di tengah masyarakat Turki baik. Dalam kebijakan domestik, Menderes mengembalikan adzan ke dalam bahasa Arab setelah sebelumnya pada era Ataturk diganti dengan bahasa Turki. Selain itu, Menderes juga mengizinkan masyarakat Turki pergi haji, membangun kembali sekolah-sekolah Islam dan pemberlakuan kembali pelajaran agama, serta menghapuskan undang-undang larangan pakaian Muslimah, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kebijakan luar negeri, Menderes menjalin kembali hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab dan menjauh secara perlahan dari Israel (Syafar, 2016).

Sedangkan pada masa Turgut Ozal, ia merujuk pada pentingnya bekas wilayah kekuasaan Turki Usmani. Ozal memanfaatkan budaya Turki untuk meluaskan pengaruh di kawasan, khususnya wilayah-wilayah yang dulu pernah menjadi bagian Turki Usmani. Kemudian disusul dengan

Erbakan yang kerap kali mendirikan partai-partai berbasis Islam di Turki.

Adapun pada era Erdogan, kebijakan luar negeri Turki lebih ditekankan kepada peningkatan posisi Turki sebagai pemimpin dunia Islam dengan cara yang halus (Agnes Czajka, 2015, hal. 6). Erdogan menyadari betul dengan identitas Turki saat ini, ditambah dengan dukungan dari simpatisan yang semakin banyak dan meluas, membuat rezimnya ingin melanggengkan kekuasaan ke depan. Erdogan menganggap politik dan demokrasi adalah sebuah sarana yang dapat mengantarkan kepada kepentingan yang ingin dicapai.

Kemudian, pada 16 April 2017 digelar sebuah referendum yang akan mengubah sejarah perpolitikan Turki. Sebelumnya, Turki menganut sistem parlementer, dimana parlemen memiliki peranan yang dominan dalam pemerintahan. Dalam referendum tersebut, Erdogan mendapatkan suara unggul dan menghasilkan perubahan konstitusi dari parlementer ke presidensial.

Hasil referendum tersebut tentu akan memudahkan Erdogan untuk melanggengkan kekuasaan hingga beberapa tahun ke depan. Hasil tersebut juga memberi keleluasaan Erdogan dalam menjalankan kepentingannya yang lahir dari Neo-Ottomanisme. Turki memiliki projek besar yang merupakan kepentingan nasionalnya saat ini yakni sebagai negara berpengaruh dan pemimpin dunia Islam (Yavuz, 1998, hal. 23). Dalam hal ini seolah Erdogan ingin menunjukkan dan mengulang masa lalu Turki yang pernah menjadi imperium besar yakni dengan adanya kerajaan Turki Usmani.

Rezim Erdogan di bawah AKP mampu mengembalikan kedudukan dan hubungan internasional Turki yang strategis, setelah berdiri dengan pilar-pilar Kemalisme selama beberapa dekade. Turki dikomandoi Erdogan mampu memainkan peranan aktif di kawasan dan menempatkan Turki sebagai pusatnya. Hal ini membuktikan bahwa Turki mulai memperluas jangkauan dan pengaruh ke sejumlah negara di Barat dan Timur, khususnya negara-negara yang memiliki ikatan geopolitik, kebudayaan, dan sejarah.

Saat ini Erdogan menggunakan identitas Turki Neo-Ottomanisme untuk menunjukkan perannya dalam kancah global yang disesuaikan dengan dimensi internasional saat ini, dimana konstelasi politik khususnya di Timur Tengah sedang memburuk. Kepentingan tersebut kemudian dilanjutkan dengan perumusan kebijakan-kebijakan luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada khususnya. Turki di bawah Erdogan terlibat aktif dalam konflik yang melanda Timur Tengah. Karena hakikatnya Neo-Ottomanisme berusaha menyeimbangkan kembali hubungan Turki dengan Timur Tengah sebagaimana yang dilakukan Turki Usmani dahulu.

Kepentingan Turki menjadi pemimpin dunia Islam, mendorong untuk berperan aktif di kawasan maupun kancah global. Turki selalu berusaha menjadi yang terdepan dalam melindungi dunia Islam yang terjajah. Seperti yang terjadi di Palestina beberapa waktu lalu, ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerukan akan memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem. Hal tersebut menuai kecaman tak terkecuali oleh Erdogan. Sebagai Ketua OKI, rezim Turki menyerukan kepada anggota-anggotanya untuk segera mengadakan KTT OKI. KTT tersebut diselenggarakan di Istanbul, 13 Desember 2017 silam (Maryati, 2017).

Selain itu, rezim Erdogan juga membantu konflik Rohingya, dimana etnis Rohingya mengalami kekerasan oleh kaum Budha di Myanmar. Banyak etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara terdekat seperti Bangladesh. Turki berkomitmen membantu etnis Rohingya dengan mengirimkan bantuan terhadap mereka. Tak tanggung-tanggung, ibu negara Turki juga ikut terjun secara langsung melihat bagaimana etnis Rohing menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

Dalam hal ini, rezim Erdogan juga mengambil peran untuk membantu dan menjadi pelindung pengungsi Suriah yang melarikan diri dari kecaman konflik Suriah. Dengan nilai-nilai Islam sufisme yang menjunjung tinggi perdamaian dan keberagaman, Turki menerima kedatangan pengungsi Suriah dengan membuka pintu di perbatasan secara lebar. Semenjak konflik Suriah meletus pada 2011 hingga saat ini,

rezim Erdogan berkomitmen untuk terus terbuka terhadap pengungsi Suriah yang datang ke Turki. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan resmi Ahmet Davutoglu berikut ini.

We, in Turkey, open our doors to every Syrian who runs for safety, regardless of his or her religion, sect or ethnicity. We embrace every Syrian. (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2012).

Turki membuka pintu bagi pengungsi Suriah dengan memperhatikan dan mematuhi hukum internasional yang berlaku, terutama dalam menegakkan asas *non-refoulment*. Merujuk pada Konvensi 1951 asas *non-refoulment* merupakan sebuah asas yang melarang suatu negara menolak atau mengusir pengungsi dengan cara apapun untuk kembali ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam karena masalah rasial, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok tertentu, atau karena opini politiknya (UNHCR, The Principle of Non-Refoulement Under International Refugee Law , 2017)

Tidak hanya sampai disitu, rezim Erdogan juga menawarkan status legal permanen dengan memberikan kewarganegaraan Turki bagi pengungsi Suriah yang sesuai dengan kualifikasi. Sebanyak kurang lebih 300.000 orang Suriah akan dinaturalisasi kemudian akan diberikan izin bekerja dalam berbagai bidang sesuai kemampuan masing-masing.

Dalam pidatonya, Erdogan mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri Turki akan melakukan pemeriksaan keamanan terlebih dahulu bagi setiap kandidat pengungsi Suriah yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Turki. Bagi masing-masing kandidat akan diperiksa mengenai apakah mereka memiliki catatan kriminal atau koneksi dengan salah satu jaringan teroris (International Crisis Group, 2016, hal. 23).

Kementerian Dalam Negeri Turki akan bertanggung jawab atas proses integrasi tersebut. Dalam pekerjaan tertentu, sebagian dari mereka akan diberikan kewarganegaraan Turki

setelah semua proses pemeriksaan yang diperlukan telah dilaksanakan. (Islam, 2017)

Pernyataan tersebut telah menuai reaksi yang beragam, tak terkecuali bagi partai oposisi yakni Partai Republik Turki (CHP) dan Partai Demokrat Rakyat (HDP). Kedua partai tersebut meminta agar dilaksanakan referendum mengenai pemberian status permanen bagi Pengungsi Suriah sebagai warga negara Turki. Akan tetapi perwakilan dari Partai AKP merasa keberatan dengan pelaksanaan referendum tersebut dan menekankan adanya kesadaran akan nilai kemanusiaan terhadap masing-masing partai tersebut (International Crisis Group, 2016, hal. 23).

Kemudian, salah satu kader senior AKP membenarkan bahwasanya Turki akan terus terbuka bagi pengungsi Suriah meski terdapat pro-kontra dalam internal Turki. Ia menyadari bahwa akhir dan konflik berkepanjangan Suriah masih belum menemukan titik temu dan menyatakan bahwa selama ketidakpastian masa depan Suriah, maka hal itu akan mempengaruhi kebijakan Turki sesuai kondisi tersebut.

Turki telah menggelontorkan dana lebih dari 12 milyar USD dari anggaran nasional. Sedangkan jumlah total pengeluaran telah mencapai 25 milyar USD, termasuk kontribusi dari anggaran daerah dan beberapa NGO. Sedangkan masyarakat internasional menyumbang sekitar 512 juta USD. Selain melakukan upaya terhadap pengungsi Suriah yang berada di Turki, pemerintah juga mengirimkan bantuan kemanusiaan ke perbatasan Suriah bagian utara melalui operasi yang dilakukan oleh Bulan Sabit Merah Turki.

Dengan identitas dan kepentingannya tersebut, Turki akan tetap berupaya menerima orang-orang yang lari dari konflik Suriah. Meski menanggung beban yang besar secara materiil maupun non-materiil, namun Pemerintah Turki tidak akan berlepas tanggung jawab terhadap orang-orang yang membutuhkan perlindungan.